

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembahasan tentang nilai-muatan politik tak ada habisnya diperdebatkan oleh para ahli. Miriam Budiardjo contohnya, dalam bukunya Dasar – Dasar Ilmu Politik menyebutkan bahwa muatan politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat (Budiarjo, 2008). Dari sumber tersebut kita dapat memahami bahwa muatan politik adalah sebuah aspek yang berkaitan dengan kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat.

Kajian seputar muatan politik bisa berupa studi tentang aktor-aktor politik —pemegang kekuasaan/pembuat peraturan. Muatan politik juga dapat terkait dengan produk-produk kebijakan otoritas seperti apa yang dilakukan presiden saat dia membuat PERPPU atau PERPRES, atau undang-undang yang dibahas oleh anggota legislatif di sidang paripurna. Pada dasarnya muatan politik bukan terletak hanya pada perbuatannya saja tapi apa yang dihasilkan dari kekuasaan tersebut. jika hasil yang didapat saat pengesahan undang-undang misalnya bersifat menguntungkan satu pihak maka berarti itulah muatan politiknya.

Ada pula penjelasan tentang muatan politik yang dikemukakan oleh Harold Laswell ilmuan politik asal Amerika serikat Ia mendefinisikan muatan politik sebagai tujuan yang diinginkan dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ia memandang kekuasaan politik

sebagai kemampuan untuk menghasilkan efek yang diinginkan terhadap orang lain (Laswell, 1936). Dalam *Politics: Who Gets What, When, How* sebuah karya yang judulnya kemudian menjadi definisi umum politik bagi masyarakat awam, ia melihat kaum elite sebagai pemegang utama kekuasaan. Namun dalam *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*, yang ditulis Laswell bersama Abraham Kaplan, pembahasannya diperluas menjadi kerangka umum untuk penyelidikan politik yang menelaah kategori-kategori analitis utama seperti individu, kepribadian, kelompok, dan budaya. Definisi Laswell mendukung pernyataan Budiardjo tentang nilai-muatan politik, yang intinya muatan politik terpusat pada kekuasaan (Laswell & Kaplan, 1965).

Beberapa ahli lainnya juga turut berkontribusi mendefinisikan muatan politik dan nilai-nilai yang menyertainya. Salah satunya adalah David Easton, ilmuan politik asal Kanada. Yang berpendapat bahwa sistem politik adalah “struktur hubungan dalam setiap masyarakat yang menjadi saluran terbentuknya dan dijalankannya alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif.”(Easton, 1953). Pendapat Easton memperlihatkan kita bahwa politik merupakan sesuatu yang disetujui oleh masyarakat dan dari itulah terciptanya hukum-hukum untuk mengikat masyarakat.

Maximilian Weber, seorang politikus jerman berpendapat bahwa politik merupakan pengejaran pada sebagian kekuasaan atau upaya untuk memengaruhi pembagian kekuasaan, baik itu di antara negara-negara maupun di antara kelompok-kelompok masyarakat yang termasuk dalam suatu negara (Weber, 1919). Pendapat ini selaras dengan yang sebelumnya bahwa politik berpusat pada kekuasaan. Weber

juga berpendapat bahwa seorang politisi harus bisa menyeimbangkan etika keyakinan dan etika tanggung jawab. Dalam artian seorang politisi harus bisa memiliki keyakinan tetapi tetap dapat melakukan apa yang benar walaupun apa yang akan dilakukannya mengacuhkan keyakinan yang ia pegang.

Ketiga ahli politik sudah berpendapat bahwa politik niscayanya berpusat pada kekuatan atau kekuasaan terhadap kelompok masyarakat. Hal yang akan dibahas ditulisan ini adalah kekuatan macam apa yang dipakai oleh orang sunda? Weber juga menjabarkan beberapa otoritas yang bisa menguasai kelompok masyarakat. Yaitu, otoritas tradisional, otoritas karisma, dan otoritas legal. Otoritas legal menurut Weber merupakan otoritas yang disepakati oleh masyarakat bahwa orang tersebut bisa memimpin mereka (Weber, 1919). Tetapi, di luar hal tersebut yang ingin diketahui di sini adalah pengenalan terhadap nilai-muatan politik itu sendiri. Banyak ahli yang berpendapat tentang kekuasaan tapi apakah hanya itu? Apakah politik hanya pada dasarnya hanya kekuasaan? seseorang boleh berargumen bahwa kekuasaan adalah sifat natural manusia. Nietzsche sendiri pernah berkata untuk menggapai ‘*will to power*’ (Nietzsche, 1883).

Plato dalam bukunya *The Republic* menyebutkan bahwa politik merupakan sebuah tindakan yang akan menghasilkan kebahagian bersama (Plato, 2024). Kita bisa melihat pandangan baru di sini. Di mana Plato menyebutkan bahwa politik berpusat pada apa yang akan dihasilkannya. Tetapi, tentu saja jika kita melihat keadaan politik sekarang yang ada hanya kebenaran yang pahit. Bahwa politik berpusat pada kekuasaan, bagi-bagi kekuasaan, nepotisme, korupsi, dan hal buruk lainnya. Sangat sedikit sekali kita menemukan contoh bahwa politik merupakan hal

yang baik. Namun, kenyataan yang pahit bukan berarti keadaan yang tidak bisa kita rubah.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengidentifikasi nilai-muatan politik yang masih terpendam dalam kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal yang menjadi fokus adalah kearifan lokal yang dihayati oleh masyarakat sunda. Dalam idealisme Weber sebelumnya tentang keseimbangan antara etika kepercayaan, dan etika kewajiban. Dapat dengan mudah ditemukan dalam seorang pemimpin tidak hanya memiliki etika kewajiban sebagai politisi, tetapi juga memiliki keyakinan yang dapat dipegang saat memimpin daerah orang sunda. Dengan itu seorang pemimpin tanah sunda dapat memimpin dengan sebaik-baiknya.

Pertanyaan yang akan penulis ungkapkan di awal tulisan ini adalah bagaimana jadinya jika kita menarik muatan politik pada kearifan lokal? Perlu diketahui sebuah fakta bahwa kearifan lokal merupakan *local wisdom* yang dapat dijadikan sebagai landasan pembuatan hukum. Kita dapat melihat muatan politik pada kearifan lokal seperti ini. Sebelum ini sudah ada pengertian apa itu muatan politik, sekarang muatan politik tersebut ditarik representasinya ke ruang yang lebih kecil, yaitu orang lokal (Susiatiningsih, 2012). Saat ada norma-norma yang terbentuk dalam masyarakat lokal, maka itu lah muatan politik pada kearifan lokal.

Norma-norma yang terbentuk dalam masyarakat orang sunda dapat dilihat dari salah satu budaya orang sunda yaitu karya lisan *sisindiran*. *Sisindiran* diungkapkan secara tersirat dan tersurat yang membuat sastra ini kompleks dengan banyaknya interpretasi. Seperti yang dikutip dari buku Inventaris Sisindiran “Dalam bidang komunikasi, pengungkapan bahasa tidak hanya digunakan bahasa

komunikatif sederhana yaitu bahasa yang bersifat denotatif namun juga bahasa konotatif atau bahasa yang memiliki *meaning of meaning* (makna yang tersurat di dalam arti kata). Di dalam ungkapan bahasa ada yang dikemukakan secara panjang lebar, ada yang diungkapkan melalui jembatan bunyi sampiran/cangkang, jembatan isi/teka-teki, ada yang digunakan ‘jembatan makna’/simbol, ada pula yang dikemukakan secara singkat dari pada penjelasannya”(Dr. kulsum et al., 2015).

Sastra *sisindiran* juga memiliki sejarah dalam pembentukannya, yang menjadikan sastra khusus ini pantas untuk dijadikan penelitian, seperti yang akan dikutip dari buku Sisindiran Inventarisasi Sastra Lisan Sunda “ bentuk ungkapan kebahasaan yang mengalami *rineka basa* (rekayasa bahasa) yang dalam genre puisi sunda disebut *sisindiran* berasal dari kata sindir, mengungkapkan sesuatu dengan sindiran. Sindiran dalam majas dikenal ironi, sarkasme, dan sinisme. Namun, genre sisindiran dalam khazanah kesusastraan sunda merupakan model pengungkapan bahasa yang khas, yang kemudian mentradisi, dan membangun sebuah genre”(Dr. kulsum et al., 2015). Dari sini dapat terlihat pola penyampaian aspirasi orang sunda yang tidak selalu menyampaikan maksudnya dengan terang-terangan, tetapi memakai genre puisi sisindiran yang sejatinya menyindir. Tetapi ini bukan bersifat negatif karena seperti yang dijelaskan oleh Dr. Kulsum yang menyusun buku kumpulan sisindiran “seseorang yang dituju dalam maksud berinteraksi menjadi mencair walau mendengar kritikan pedas bagi dirinya karena kesegaran situasi bahasa dan estetikanya dari *sisindiran*, dengan makna yang tepat sasaran, karena menggunakan teknik indeksi kalitas (mengarahkan) dengan nada lembut dengan

balutan estetika” (Dr. kulsum et al., 2015). Tetapi perlu disadari bahwa sisindiran merupakan sastra lisan yang kemudian menjadi sastra tulis.

Dalam sastra sisindiran oleh suku sunda, sastra tersebut dipakai untuk menyuarakan pendapat masyarakat sunda terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Termasuk juga pemakaian sastra sisindiran oleh pemegang kekuasaan untuk dipakai sebagai alat politik untuk mempengaruhi massa yang dipimpinnya.

Dengan demikian, sisindiran tidak hanya dapat dipahami sebagai produk sastra lisan semata, melainkan juga sebagai alat media komunikasi nilai-muatan politik masyarakat Sunda. Melalui sindiran yang halus dan estetis, relasi kuasa, kritik sosial, serta norma-norma politik lokal disampaikan tanpa harus hadir dalam bentuk konfrontatif. Inilah yang menjadikan sisindiran relevan untuk dikaji sebagai cermin muatan politik berbasis kearifan lokal, sekaligus sebagai alternatif cara memahami praktik politik di luar kerangka kekuasaan formal semata.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sastra sisindiran digunakan sebagai alat media komunikasi dalam menyampaikan nilai-muatan politik masyarakat Sunda?
2. Muatan politik apa saja yang termuat dalam sisindiran?

## C. Tujuan Penelitian

Mengikuti rumusan masalah di atas penulis juga menyimpulkan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Dapat mengartikulasikan bagaimana sastra sisindiran digunakan sebagai alat media komunikasi dalam menyampaikan nilai-muatan politik masyarakat sunda.
2. Muatan politik dalam sastra sisindiran menjadi lebih jelas.

#### **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Penulis yakin dalam menyusun skripsi ini akan timbul kegunaan dan manfaat pada bagian teoritis dan praktis, dalam artian penelitian ini akan berguna untuk berbagai kalangan.

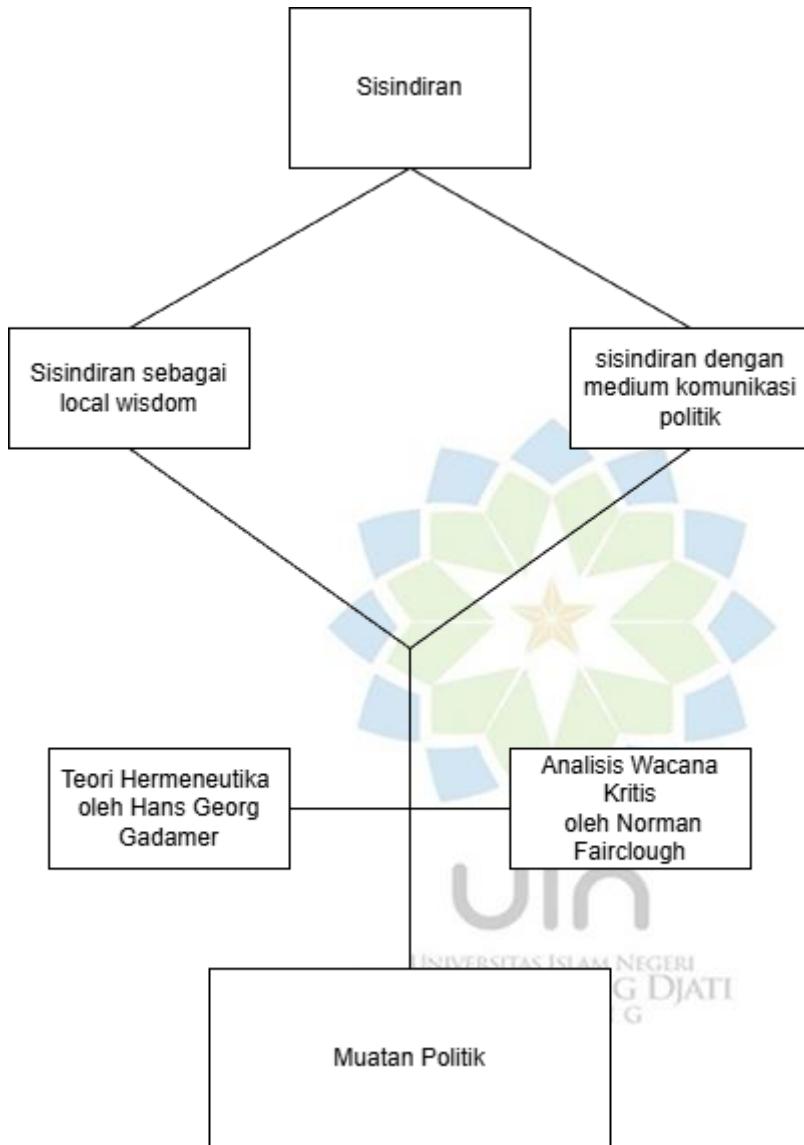
##### **1. Kegunaan dan manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sastra dan ilmu politik, khususnya dalam memahami sastra sisindiran sebagai medium penyampaian nilai-muatan politik masyarakat Sunda. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai hubungan antara karya sastra tradisional dan ekspresi nilai politik dalam konteks budaya lokal.

##### **2. Kegunaan dan manfaat praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca, khususnya masyarakat dan akademisi, untuk lebih memahami muatan politik yang terkandung dalam sastra sisindiran. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas sastra tradisional sebagai media komunikasi nilai-nilai sosial dan politik.

## E. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran penelitian yang berpusat pada sisindiran. Sisindiran ditempatkan sebagai objek utama yang kemudian dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, sisindiran dipandang sebagai local wisdom, yang menegaskan posisinya sebagai produk budaya masyarakat Sunda. Di sisi lain, sisindiran juga dilihat sebagai medium komunikasi politik, yang menunjukkan fungsinya bukan sekadar karya sastra, tetapi juga alat penyampaian pesan.

Kedua sisi ini lalu menggunakan teori hermeneutika Hans Georg Gadamer. Teori ini berfungsi sebagai landasan dalam memahami makna yang terkandung dalam sisindiran berdasarkan konteks dan pemaknaan budaya. Penggunaan analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough, yang mengarahkan analisis pada bagaimana bahasa dalam sisindiran memuat dan menyampaikan kepentingan atau nilai tertentu.

Kedua pendekatan tersebut bermuara pada satu tujuan analisis, yaitu mengungkap muatan politik yang terkandung dalam sisindiran. Dengan demikian, gambar ini menunjukkan alur pemikiran bahwa sisindiran, melalui pendekatan hermeneutika dan analisis wacana kritis, dapat dipahami secara lebih mendalam sebagai karya sastra yang mengandung muatan politik

